

PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DPPKB) DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Fitra Admaja¹, Rita Kalalinggi², Anwar³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengendalian pertumbuhan penduduk. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis deskriptif kualitatif. Key informannya adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan proses pengendalian pertumbuhan penduduk DPPKB menjalankan berdasarkan fungsinya yaitu melalui perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB dan kader KB serta Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah sumber daya manusia, anggaran dan juga sarana dan prasarana. Peran yang dilaksanakan sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Peran, pengendalian, pertumbuhan, penduduk.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang laju pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, yaitu negara yang berada di peringkat keempat dengan jumlah penduduknya setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Hasil sensus Penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia pada tanggal 1 Mei-15 Juni 2010 menunjukkan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: fitraadmaja894@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

bahwa jumlah penduduk Indonesia sekitar 237,6 jiwa dan melebihi 3,4 juta dari sebelumnya yaitu sebesar 234,2 juta jiwa ditambah dengan peningkatan angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) periode tahun 2000-2010 sebesar 1,49 % yang lebih tinggi dari periode tahun 1990-2000 yaitu 1,45%.

Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya struktur umur penduduk di beberapa provinsi menjadi masalah pokok yang dihadapi dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana nasional. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi disebabkan masih tingginya tingkat kelahiran di satu pihak dan lebih cepatnya penurunan tingkat kematian di lain pihak.

Laju pertumbuhan penduduk di Samarinda disebabkan oleh dua faktor yaitu angka kelahiran (*Fertilitas*) dan juga adanya pendatang yang masuk dari luar daerah (*Mortalitas*). Jika melihat angka kelahiran di Kota Samarinda Berdasarkan data yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang dikutip dari berita samarinda.co angka kelahiran meningkat tajam. Tercatat pada 2015, jumlah akta yang diterbitkan mencapai 18.870. Angka kelahiran terus mengalami kenaikan, pada tahun 2016 jumlah akta yang diterbitkan sebanyak 20.605. Kemudian tahun 2017, hingga bulan Agustus sudah 14.000 lembar akta. Tingginya angka kelahiran tentu berdampak langsung pada jumlah penduduk. Saat ini jumlah penduduk di Kota Tepian mencapai 843.444 jiwa. Hal itu merupakan hal yang lumrah mengingat status Samarinda sebagai ibu kota provinsi.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menangani masalah pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda khususnya terkait dengan angka kelahiran. Dimana program yang dibuat bisa optimal di laksanakan karena terkendala oleh defisit anggaran yang sedang terjadi di Kota Samarinda. Pada tahun 2017-2018 ada beberapa kegiatan yang bisa dijalankan oleh dinas pengendalian penduduk dan Keluarga berencana kota samarinda yaitu kegiatan sosialisasi keluarga berencana dan pembagian alat kontrasepsi berupa kondom, suntik dan juga pil KB. Tentunya hal ini sangat berpengaruh dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda.

Program pengendalian penduduk yang berkaitan dengan pengendalian angka kelahiran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda dapat dilihat dari adanya pendanaan program (outcome) Program Kependudukan Keluarga Berencana, dimana ini merupakan anggaran untuk mendukung kegiatan Program Kependudukan Keluarga Berencana di tingkat Kabupaten Kota Samarinda.

Permasalahan persebaran penduduk ini, menyebabkan unmet need di Samarinda masih cukup tinggi. Selain itu juga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan hidup untuk melayani perkembangan jumlah penduduk tersebut. Kebutuhan ini meliputi misalnya kebutuhan konsumsi untuk makan, perubahan,

fasilitas kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan sebagainya. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk berusia muda juga timbul kebutuhan yang lebih besar akan fasilitas pendidikan.

Dengan demikian kelompok penduduk yang berusia produktif baru memikul beban yang relatif lebih berat untuk melayani kebutuhan penduduk yang belum termasuk usia kerja. Struktur umur penduduk juga mengakibatkan meningkatnya dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang memasuki usia kerja, sehingga menimbulkan masalah kebutuhan penyediaan lapangan kerja. Selain itu juga menyebabkan angka kelahiran menurut umur (ASFR) di Samarinda juga belum turun secara signifikan sebagaimana yang diharapkan. Masalah-masalah penduduk tersebut perlu ditanggapi dengan suatu kebijakan kependudukan yang menyeluruh. Dasar kebijakan ini adalah memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan perubahan struktur umur penduduk dengan perkembangan sosial ekonomi sehingga tingkat hidup yang layak dapat diusahakan. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh hanya Pemerintah Daerah saja atau Pemerintah Pusat saja. Perlu adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai wujud pelaksanaan amanat undang-undang Nomor 23 tahun 2014.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda.”

Kerangka Dasar Teori

Peran

Kata “peran” diambil dari istilah teater dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelompok-kelompok masyarakat. Peran ialah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan (Wolfman, 1992:10).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Katz dan Khan (dalam Mifta Thoha, 2002:80), integrasi organisasi merupakan peleburan komponen peran, norma dan nilai. Peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang atau sebuah organisasi yang ditentukan oleh karakteristik pribadi.

Sedangkan menurut The Liang Gie (2004:44) peran adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun secara praktis suatu aturan saling bergantung satu sama lain.

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Sesuai ketentuan pasal 12 ayat (2) bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana adalah bukan urusan yang bersifat fungsi penunjang akan

tetapi bersifat urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dengan demikian tidak memungkinkan menggunakan Nomenklatur (Badan). Jika tidak menggunakan nomenklatur badan maka untuk penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana jelas berbentuk Dinas, lebih tepat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran penting dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda. Banyak upaya dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang mana rasio laju pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda yang terbesar diantara Kabupaten atau Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu upayanya adalah turun langsung ke masyarakat.

Pengendalian

Menurut Mulyadi (2007:89) Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen. Menurut Harahap (2011:89) Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yang disertai tindakan pelurusan (korektif).

Berdasarkan uraian di atas bisa di tarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yg dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua bisa berfungsi secara maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Penduduk

Menurut UUD 1945 Pasal 26 ayat 2 Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

Jadi dari uraian diatas bisa diambil penjelasan bahwa penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berintraksi satu sama lain secara terus menerus

Pertumbuhan Penduduk

Menurut Mulyadi Subri (2003:16), pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu : kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar.

Sedangkan menurut Noveria Mita (2011: 5) Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Untuk tingkat global (dunia), pertumbuhan penduduk hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh dua peristiwa kependudukan tersebut dikenal dengan pertumbuhan penduduk alami. Pada lingkup yang lebih kecil, misalnya ditingkat negara, pertumbuhan penduduk dipengaruhi pula oleh imigrasi penduduk ke dan keluar dari suatu Negara.

Disebutkan pula pada Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 bahwa dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Perubahan jumlah/ukuran (size) penduduk yang terjadi akibat berlangsungnya peristiwa kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Sehingga, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan

menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Lokasi penelitian merupakan suatu daerah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian dilaksanakan oleh peneliti, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui batasan dan ruang lingkup dari wilayah penelitian itu sendiri. Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Dinasendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada kejelasan ketepatan pengolahan data yang didapatkan dari metode penelitian yang dilakukan dan digunakan. Dengan judul “ Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Samarinda “, penulis mengambil fokus penelitian mengenai pengendalian angka kelahiran yang diperoleh dari Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No. 163 Tahun 2016 Pasal 12, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten atau Kota.

1. Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda, antara lain :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
 - b. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
 - c. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB dan kader KB
 - d. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
2. Faktor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam menanggulangi pengendalian penduduk di Kota Samarinda.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk dan KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, telah melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis dibidang bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dimana proses perumusannya dimulai dari sub PPKBD kemudian melalui DPPKB, hal tersebut bertujuan agar apa yg dibutuhkan masyarakat bisa benar-benar diberikan melalui kebijakan yg akan di buat. Sub Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) sendiri merupakan seseorang atau beberapa orang kader yang tergabung dalam sebuah wadah organisasi, yang berperan secara aktif melaksanakan/mengelola program keluarga berencana nasional di tingkat kelurahan atau desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda menuangkannya dalam bentuk kegiatan berupa Kampung KB. Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah setingkat RT, dusun, atau yang setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.

Program kampung KB yang dibentuk oleh DPPKB Kota Samarinda, tentunya bertujuan untuk mengendalikan angka pertumbuhan penduduk melalui cara menekan laju pertumbuhan dari angka kelahiran, pembentukan kampung KB dipilih berada didaerah pinggiran yang memiliki angka kelahiran tinggi dan perekonomian rendah, agar lonjakan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini bisa ditekan sehingga dapat mengurangi beban pembangunan yang ada di kota samarinda.

Ada tiga hal pokok yang yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sebagai syarat dibentuknya kampung KB dalam suatu wilayah, yaitu:

1. Tersedianya data kependudukan yang akurat
2. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah
3. Partisipasi aktif masyarakat

Dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan lokasi Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yaitu :

1. Kriteria utama: yang mencakup dua hal, yaitu: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung KB tersebut berlokasi.
2. Kriteria wilayah: yang mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu), yaitu: (1) Kumuh, (2) Pesisir, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Selanjutnya dalam menentukan kriteria wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pembentukan Kampung KB dapat dipilih satu atau lebih dari sepuluh kriteria yang ada.
3. Kriteria Khusus: yang mencakup 5 hal, yaitu: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK-R masih rendah, (5) kriteria program

pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bisa ditambah dengan program lainnya sesuai dengan perkembangan.

Pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk

Dalam melakukan pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Samarinda terlebih dahulu melakukan proses pendataan dengan penyelenggaraan sistem informasi keluarga dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pengendalian penduduk. Dalam proses ini memerlukan data dan Informasi keluarga yang dikelola dalam Sistem Informasi Keluarga dimana data yang diperoleh dari sub PPKBD yang ada di setiap wilayah yang ada disetiap kecamatan Kota Samarinda.

Setelah data penduduk telah didapat, selanjutnya dilakukan pengolahan pendataan keluarga yang dilakukan secara berjenjang untuk menetapkan sasaran dan rencana operasional Pengolahan data hasil pendataan keluarga yang ada pada setiap wilayah di Kota Samarinda, proses ini dilakukan melalui teknologi informasi yaitu Devinfo. Pengolahan pencatatan dan pelaporan dilakukan secara berkala dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda bisa mengetahui wilayah mana saja yang menjadi sasaran program dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota samarinda melalui pengendalian lewat angka kelahiran.

Melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka menjalankan perannya dalam pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk seperti yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.163 Tahun 2016 Pasal 12 telah sesuai dan menurut teori dari The Liang Gie (2004:44) yang mengatakan bahwa peran adalah sekelompok aktivitas atau pekerjaan yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya ataupun secara praktis sebagai aturan yang berkaitan dengan orang banyak. Dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, dalam menjalankan proses pemetaan tengah menjalankan pekerjaan atau kegiatan yang masih berkaitan dengan proses pengendalian penduduk dan jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan, dalam hal ini Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Samarinda telah melaksanakan pemetaan perkiraan jumlah penduduk ini.

Pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB dan Kader KB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bisa penulis jelaskan bahwa untuk saat ini petugas lapangan keluarga berencana yang ada di Kota Samarinda bisa dikatakan sudah memiliki kemampuan yang memadai. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda yang menjadi instansi yang bertugas untuk pendayagunaan petugas lapangan telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Petugas lapangan dituntut untuk bisa memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mengikuti program KB dari pemerintah untuk menekan angka kelahiran dalam rangka pengendalian penduduk di kota Samarinda. Hanya saja, untuk saat ini apa yang dihasilkan oleh petugas lapangan masih belum optimal, dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang tersedia saat ini sebagai petugas lapangan. Jika idealnya satu petugas lapangan bertugas di satu kelurahan untuk saat ini masih ada petugas yang merangkap di kelurahan lain, dan ini tentu akan mengurangi kualitas yang akan dihasilkan oleh petugas lapangan itu sendiri.

Pelaksanaan pendayagunaan petugas lapangan yang mana adalah bagian dari peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Merton (2007:242) bahwa peran adalah sekelompok aktivitas atau kegiatan yang diharapkan masyarakat dari organisasi yang menduduki bidang tertentu, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda memposisikan diri sebagai kelompok, dan pendayagunaan petugas lapangan adalah bagian dari kelompok tersebut yang kemudian diharapkan mampu menjalankan fungsi dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi

Pelaksanaan pengendalian pendistribusian alat dan obat KB telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, hal ini bisa dilihat dari ketersediaan obat dan juga alat kontrasepsi cukup mudah didapatkan oleh masyarakat di setiap wilayah yang ada di Kota Samarinda. Karena memang selama ini sebelum melakukan proses pendistribusian Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda terlebih dahulu memproses pelaporan dan juga pendataan terkait dengan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan.

Proses pendistribusian dan pengendalian alat dan obat kontrasepsi ini adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran, sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh keluarga, baik yang menyangkut kegiatan PUP. Dalam kesertaan KB Pendewasaan Usia Perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Adapun alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan bervariasi seperti pil KB, suntik dan kondom. Dalam proses pendistribusiannya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda membagikan alat dan obat kontrasepsi ini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar, contoh yang berbayar misalnya jenis Metode KB Jangka Panjang (MKJMP) seperti alat kontrasepsi dalam Rahim (IUD) dan implant, serta yang gratis seperti pil KB, Kondom, dan suntik. Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ini tentu akan sangat membantu peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui angka kelahiran yang ada di Kota Samarinda.

Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Kota Samarinda adalah salah satu dari fungsi seperti yang tertuang dari Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No.163 Tahun 2016 pasal 12, dan apa yang telah dilaksanakan sejalan dengan teori peran menurut Merton (2007:242) bahwa peran adalah sekelompok aktivitas atau kegiatan yang diharapkan masyarakat dari organisasi yang menduduki bidang tertentu, dalam hal ini pelaksanaan pendistribusian dan pengendalian alat dan obat kontrasepsi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kota Samarinda adalah hal yang diharapkan dapat berguna dalam proses menurunkan angka kelahiran di Kota Samarinda.

Faktor penghambat Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam menanggulangi pengendalian penduduk di Kota Samarinda

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis dapat menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pengendalian dalam menanggulangi pengendalian penduduk di Kota Samarinda khususnya dalam menekan angka kelahiran, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang ada, saat ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda masih memiliki kekurangan sumber daya manusia khususnya untuk petugas lapangan KB, petugas lapangan KB saat ini dirasa belum cukup memadai untuk bisa memenuhi seluruh wilayah yang ada di Kota Samarinda, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi jalannya program pengendalian penduduk, selain itu juga permasalahan sarana dan prasarana yang belum cukup menunjang khususnya di bidang pemetaan perkiraan penduduk, sarana penunjang seperti alat dan juga komputer khusus yang ada dirasa masih kurang untuk menunjang kegiatan pemetaan sehingga jalannya kegiatan selama ini masih belum bisa optimal.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga telah dilakukan, dimulai dari sub PPKBD kemudian DPPKB, salah satu kegiatan yang dilakukan dari

perumusan kebijakan tersebut adalah membentuk kampung KB, kegiatan ini dilakukan agar bisa benar-benar menyesar seluruh lapisan masyarakat kota Samarinda.

2. Pelaksanaan pemetaan perkiraan penduduk selalu berjalan setiap tahunnya dan dilaksanakan sebelum musrenbang. Pemetaan perkiraan pengendalian informasi mengenai perkiraan penduduk akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan program pengendalian penduduk yang ada di kota Samarinda. Dalam melakukan proses pemetaan DPPKB telah menggunakan sebuah aplikasi ataupun system yang bernama Devinfo, aplikasi ini adalah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui BKKBN untuk mempermudah proses pemetaan yang akan dilakukan.
3. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB atau petugas lapangan KB dan kader KB dilakukan melalui proses pelatihan mengenai penggunaan alat KB serta pemanfaatannya kepada seluruh petugas KB yg telah ada, sehingga petugas KB diharapkan mampu melakukan pendekatan terhadap masyarakat agar terlibat dan ikut berpartisipasi dalam program KB,
4. Proses pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi telah dilakukan, adapapun prosesnya melalui koordinasi yang dilakukan dengan BKKBN provinsi Kalimantan Timur, kemudian dilakukan proses pendataan tentang keperluan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan, setelah alat dan obat kontrasepsi itu tersedia akan langsung distribusikan ke masing-masing wilayah yang memerlukan seperti yang telah terdata sebelumnya
5. Faktor penghambat dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian pertumbuhan Penduduk Kota Samarinda adalah kurangnya sumber daya manusia, sehingga menyebabkan masih kurangnya penempatan petugas lapangan KB yang ada di wilayah kota Samarinda. Selain itu, masalah anggaran juga menjadi penghambat dalam proses pengendalian pertumbuhan penduduk, sehingga mengakibatkan beberapa program yang tidak bisa dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, dan yang menjadi faktor penghambat selanjutnya adalah masih kurangnya sarana penunjang kegiatan seperti computer, oksigen dan mobil KB keliling yang dimiliki, hal ini tentu menjadi kendala bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan beberapa program, misalnya seperti pelaksanaan proses pemetaan.

Saran

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kota bekerjasama dengan pemerintah provinsi, maupun stakeholder lain untuk membahas tentang proses penambahan anggaran guna menunjang jalannya

proses pelaksanaan kegiatan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda.

2. Terkait dengan masih kurangnya Sumber Daya manusia (SDM), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bisa berkoordinasi dengan BKKBN provinsi untuk membahas tentang masih kurangnya petugas lapangan KB, karena BKKBN provinsi berhak untuk merekrut petugas lapangan KB.
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda, seharusnya bisa memberikan perhatian lebih terhadap pengadaan sarana penunjang kegiatan, karena ini menjadi bagian penting bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menunjang beberapa kegiatan yang berkaitan dengan proses pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Jakarta: PT Rajawali Pers
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2000
- Mulyadi. 2007. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Noveria, Mita. et al. 2010. *Perubahan Struktur Penduduk dan Strategi Adaptasi Dalam Konteks Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- The Liang Gie, 2004. *Cara Belajar Yang Baik Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Gajah Mada
- Wolfman, B. S. 1992. *Peran kaum wanita: Bagaimana menjadi cakap dan seimbang dalam aneka peran*. Yogyakarta : kanisius.

Dokumen:

- Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009
- UUD 1945 Pasal 26 ayat 2